



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL**
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

oleh:
Tri Yulianita Hidayati
NIM 100810301050

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL**
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Jurusan Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar sarjana

oleh:

Tri Yulianita Hidayati
NIM 100810301050

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.,
rasa kasih sayang yang tulus, cinta, dan rasa terima kasih ku kepada :

Ayah “Drs. Sunarto” dan Ibu “Sri Nanti” tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, bimbingan, nasehat, motivasi dan kerja keras yang dilakukan selama ini untuk mendidik, serta do’a yang selalu menyertai perjalanan hidupku demi keberhasilan dan kesuksesanku

Kakak-Kakakku “ Danny Cahyono Narsrianto” dan “ Dwi Ratna Puspita Sari”, terima kasih telah memberikan kasih sayang, dan semangatnya

“Zeinuddin”, terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan semangatnya, terima kasih telah menemani setiap langkahku dalam suka dan duka

“ Kenys Mya F., Rinda Tri P., Arifah Y., A. Ainung K., Ida S., Nafida N. , terima kasih atas kebersamaan dan semangatnya

Almamaterku tercinta

MOTTO

Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau kemampuannya.

(Q.S. Al Baqarah; 286)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(Q.S. Al Baqarah; 153)

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berhadap

(Q.S Al Sharh; 6-8)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tri Yulianita Hidayati

NIM : 100810301050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul " Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012) " adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2014

ayatakan,

Tri Yulianita Hidayati
NIM 100810301050



SKRIPSI

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL**
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

oleh:

Tri Yulianita Hidayati
NIM 100810301050

Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Andriana, SE., M.Sc
Dosen Pembimbing 2 : Taufikkurrohman, SE.,M.SA., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)**

Nama : Tri Yulianita Hidayati

Nomor Induk Mahasiswa : 100810301050

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 23 Mei 2014

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Andriana, SE., MSc.

NIP. 19820929 201012 2 002



Taufikkurohman, SE., MSA, Ak.

NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak

NIP. 197204162001121001

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tri Yulianita Hidayati

NIM : 100810301050

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

09 Juni 2014

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak
NIP 19640809 199003 2 001

Sekretaris : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak
NIP 19591110 198902 1 001

Anggota : Wahyu Agus Winarno, SE, M.Sc, Ak
NIP 19830810 200604 1 001

(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. Muhammad Fathorrazi, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Tri Yulianita Hidayati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Studi empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Realisasi APBD dan data PDRB dari BPS Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji f dan uji t. Variabel independen terdiri atas Produk Domestik Regional Bruto (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.

Kata kunci: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Realisasi Belanja Modal .

Tri Yulianita Hidayati

Accounting Departement, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

The research aims to identify and examine the effect of Gross Domestic Product , Regional Income Allocation Fund and the General Fund to the Special Allocation Actual Capital Expenditure Budget . Empirical studies on the District / City of East Java Province 2009-2012 budget year . The data used in this study is the realization of a data budget and GDP Data from BPS East Java Province. This research is a quantitative study using a descriptive statistical tests, the classical assumption test, multiple regression analysis, koefisien determination, f test and t test. The independent variables consist of Gross Domestic Product (X1), Revenue (X2), the General Allocation Fund (X3) and the Special Allocation Fund (X4) while Capital Expenditure Budget Actual (Y) as the dependent variable. The results of the study showed that the Regional Revenue and General Allocation Fund and significant positive effect on the Realization of Capital Expenditure, Gross Domestic Product, and Special Allocation Fund has no effect on Actual Capital Expenditure Budget.

Keywords : Special Allocation Fund , the General Allocation Fund , Local Revenue , Gross Domestic Product and Capital Expenditure Budget Actual

RINGKASAN

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal; Tri Yulianita Hidayati, 100810301050; 2014: 59 halaman; Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya, terutama Pengelolaan fiskalnya. Hal ini memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat daerah tersebut dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan pelayanan public yang baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dananya dalam bentuk Anggaran Belanja Modal pada APBD. Alokasi Belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas maupun fasilitas public dan dengan mengoptimalkan penerimaan yang ada seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sumber Penerimaan Lainnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji variabel Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2009-2012, menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampel sehingga didapat 28 Kabupaten/Kota. Jenis data dari penelitian ini berupa data sekunder yaitu berupa laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2009-2012 dan data Badan Statistik Daerah yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Variabel independen terdiri atas Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Modal sebagai variabel dependen.

Analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil persamaan regresi yaitu $Y = 7,652 + 0,017PDRB + 0,156PAD + 0,568DAU + 0,026DAK$. Nilai dari koefisien determinasi sebesar 44,8%, hal ini menunjukkan variasi variabel dependen (Y) yaitu realisasi anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi empat variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) sedangkan sisanya sebesar 55,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil Uji F dari menunjukkan bahwa f hitung dari model regresi sebesar 23,554 dan f tabel sebesar 2,30 maka $F_{hitung} (23,554) > F_{tabel} (2,30)$. Dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 5 %. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai model pengujian hipotesis.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal menunjukkan t hitung sebesar 0,423 dan t tabel sebesar 1,981 serta nilai signifikansi sebesar 0,673 yang berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal sehingga H1 ditolak. Hal ini dikarenakan Produk Domestik Regional bruto tidak menjadi acuan Pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk merealisasikan anggaran Belanja Modal.

Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal menunjukkan t hitung sebesar 1,984 dan t tabel sebesar 1,981 serta nilai signifikansi sebesar 0,050 yang sama dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal sehingga H2 diterima. Hal ini dikarenakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat memenuhi belanja modal Pemerintah Daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal menunjukkan t hitung sebesar 4,009 dan t tabel sebesar 1,981 serta nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan Dana

Alokasi Umum berpengaruh Signifikan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal sehingga H3 diterima.

Variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal menunjukkan t hitung sebesar 0,535 dan t tabel sebesar 1,981 serta nilai signifikansi sebesar 0,594 yang berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal sehingga H4 ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan Dana Alokasi Khusus menurun setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum tidak dapat memenuhi belanja Modal Pemerintah Daerah.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Fathorrozi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember;
3. Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Andriana, SE, M.Sc., selaku dosen pembimbing I dan Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak selaku dosen pembimbing II yang telah menyempatkan, waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh dosen akuntansi yang telah memberikan pemahaman tentang akuntansi
6. Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku yang telah memberikan doa, semangat, dukungan dan waktunya untukku dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seseorang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan waktunya untuk selalu menemani dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan untukku dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan dukungan untukku dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas jember;
11. Semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu-persatu;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	6
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Otonomi Daerah	7
2.1.1 Pengertian.....	7
2.1.2 Prinsip Otonomi	7
2.1.3 Titik Berat Otonomi Daerah.....	8
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
2.2.1 Pengertian	9
2.2.2 Struktur APBD	10

2.2.3	Proses Penyusunan APBD	12
2.3	Anggaran Sektor Publik.....	13
2.4	Realisasi Anggaran	13
2.5	Belanja Modal	14
2.6	Faktor-faktor yang mempengaruhi.....	16
2.5.1	Produk Domestik Regional Bruto	16
2.5.2	Pendapatan Asli Daerah	18
2.5.3	Dana Alokasi Umum.....	19
2.5.4	Dana Alokasi Khusus.....	20
2.7	Penelitian Terdahulu	22
2.8	Kerangka Konseptual.....	23
2.9	Pengembangan Hipotesis.....	24
BAB 3. METODE PENELITIAN		
3.1	Populasi Sampel	28
3.2	Sumber dan Jenis Data.....	28
3.3	Variabel Operasional	29
3.4	Metode Analisis Data	30
3.4.1	Statistik Deskriptif	30
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5	Pengujian Hipotesis.....	33
3.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda	33
3.5.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	33
3.5.3	Uji Signifikan F.....	34
3.5.4	Uji Statistik t	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
4.1.1	Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur.....	35
4.1.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur.....	36
4.1.3	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur.....	36
4.1.4	Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Jawa Timur	37

4.1.5 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Jawa Timur	38
4.2 Hasil Analisis Data	39
4.2.1 Deskripsi Data	39
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	42
4.2.3 Pengujian Hipotesis	46
4.3 Pembahasan	51
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Keterbatasan.....	57
5.3 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	32
4.1 Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur ...	35
4.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.....	36
4.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.....	37
4.4 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	38
4.5 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	39
4.6 Sampel Penelitian.....	40
4.7 Statistik Deskriptif	41
4.8 Uji Normalitas Data	43
4.9 Uji Multikolinearitas	44
4.10 Uji Autokorelasi	46
4.11 Analisis Regresi Berganda	47
4.12 Koefisien Determinasi.....	48
4.13 Uji Signifikan F.....	49
4.14 Uji Hipotesis	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
4.1 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Nilai masing-masing variabel pada masing-masing sampel.....	60
B. Hasil <i>Output</i> SPSS Versi 16	74

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten dan kota di setiap provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Seperti yang telah tercantum pada Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dan tentunya dengan diberlakukannya otonomi daerah dengan tujuan agar setiap daerah otonom dapat mengelola daerahnya menjadi daerah yang mandiri untuk menyejahterakan masyarakat daerah tersebut, terutama dari pengelolaan fiskalnya.

Untuk mendukung pengelolaan fiskal di daerah otonom, maka diberlakukannya Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pasal 1 dituliskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah antara lain : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Dari sumber pendanaan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat dan mengurangi tingkat ketergantungan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Prakosa (2005) mengatakan bahwa, dengan adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah.

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Pemerataan standar pelayanan publik yang baik dilihat dari bagaimana pengalokasian belanja modal daerah dengan baik pula, karena belanja modal merupakan langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pencapaiannya menyejahterakan masyarakat dengan pelayanan yang baik pula.

Kewenangan otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena pemberian kebebasan kepada pemerintah dalam mengelola daerahnya baik secara finansial dan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sumberdaya daerah dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat daerah tersebut dan tentunya dengan pelayanan publik yang baik. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatkan pendapatan per kapita sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal digunakan untuk pembangunan dan perbaikan berbagai sektor di suatu negara, sehingga masyarakat juga dapat menikmati pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dananya dalam bentuk anggaran belanja modal pada APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik, dengan mengoptimalkan sumber penerimaan yang ada, diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pembiayaan seperti Pinjaman Daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah tersebut, peningkatan pendapatan asli daerah tentunya harus diringi peningkatan belanja modal yang digunakan untuk melengkapi sarana dan

prasarana publik. Dana transfer yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tentunya digunakan untuk kepentingan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Realisasi anggaran menunjukkan tingkat ketercapaian target-target anggaran yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah pada periode yang akan datang. Realisasi anggaran menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang nyata dan akan dipertanggungjawabkan. Hal itu menunjukkan bahwa informasi realisasi anggaran sangat penting disajikan untuk pengguna laporan, terutama untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan anggarannya dan mengukur ketercapaian target anggaran.

Krisis Global yang terjadi ternyata juga memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan 17 % di tahun 2009 dan mengalami kenaikan yang pesat hingga tahun 2012. Hal itu tidak mempengaruhi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan yang baik tentunya mendukung Pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja modal dengan baik pula. Realisasi anggaran Belanja Modal tentunya dipengaruhi oleh Realisasi Penerimaan yang diterima daerah seperti, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Realisasi Anggaran Belanja Modal yang terus meningkat tentunya akan berdampak Perkembangan ekonomi yang meningkat pula.

Ketidak konsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menjadi latar belakang saya untuk menguji kembali pengaruh PDRB, PAD, DAU, DAK terhadap Alokasi Belanja Modal. Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli

Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) tentang Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. Hasil penelitian ini membuktikan DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD. Putro & Pamudji (2011) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU, terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Peneliti – peneliti sebelumnya menggunakan Data Realisasi Belanja Modal sebagai alat ukur variabel Belanja modal meskipun judul yang di publikasikan adalah pengalokasian anggaran belanja modal.

Oleh karena itu, untuk memperjelas variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka judul yang dipilih adalah “ *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian antara lain :

- a. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
- b. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
- c. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
- d. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk Mendapatkan Bukti Empiris Pengaruh Peroduk Domestik Regional Bruto terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk Mendapatkan Bukti Empiris Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk Mendapatkan Bukti Empiris Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
4. Untuk Mendapatkan Bukti Empiris Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar pada penelitian selanjutnya
2. Bagi Pendidikan, memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
3. Bagi Obyek Penelitian, sebagai saran informasi untuk lebih memaksimalkan kinerja daerah dan menggali potensi daerah dengan tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik untuk menyejahterakan Masyarakat daerah dengan pengalokasian belanja Modal daerah dengan baik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian

Menurut Ketentuan Umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang

dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan daerah).

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan daerah).

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan daerah).

2.1.3 Titik Berat Otonomi Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II atas Kabupaten/Kota, dengan dasar pertimbangan: pertama,

darai dimensi politik, Kabupaten dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Kedua, dari dimensi administratif, penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif. Ketiga, kabupaten adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupatenlah yang lebih tahu kebutuhan potensi rakyat di daerahnya. Pada gilirannya, yang terakhir ini dapat meningkatkan pertanggungjawaban daerah kepada masyarakat. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu otonomi nyata dan bertanggungjawab diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan (Mudrajad Kuncoro, 2004 : 3)

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 17 Th. 2003 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa peraturan daerah tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD (Noerdiawan, 2007 :39)

2.2.2 Struktur APBD

2.2.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD, dana Perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah (Noerdiawan, 2007 : 40).

- a) Pendapatan Asli Daerah mencakup pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
- b) Dana Perimbangan mencakup Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten, dana penyesuaian, dan ddana otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

2.2.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalma satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung (Noerdiawan, 2007 : 40).

1) Belanja tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelkasanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, subsidi, hibah, bunga, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

2) Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri

atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa dan belanja modal

2.2.2.3 Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No.33 Th.2004 merupakan setaip penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. pembiayaan daerah meliputi (Noerdiawan, 2007:43)

- a. Penerimaan Pembiayaan, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup : (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), (2) pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) penerimaan pinjaman daerah, (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan (6) penerimaan piutang daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Jika APBD mengalami surplus, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan mencakup : (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal (investasi) pemda, (3) pembayaran pokok utang, dan (4) pemberian pinjaman daerah

2.2.2.4 Surplus Dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus terjadi ketika

anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar anggaran belanja daerah. Dan sebaliknya jika pendapatan daerah dalam satu tahun diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya, maka akan terjadi defisit APBD (Noerdiawan 2007 : 42)

Surplus APBD dapat dimanfaatkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemda lain. Surplus juga dapat digunakan untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembayaran untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman (Noerdiawan 2007 : 42).

2.2.3 Proses Penyusunan APBD

Anggaran pendapatan dan Belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pedoman penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara (Noerdiawan : 2007).

Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD yaitu,

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

2.3 Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No. 17 Tahun 2003)

Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk menambah biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

2.4 Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5 Belanja Modal

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori :

- a) Belanja Modal Tanah
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e) Belanja Modal Fisik Lainnya.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi :

- a. Belanja Pelayanan Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja aparatur daerah, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja modal itu sendiri diartikan sebagai bentuk belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah

masa umur, manfaat dan kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapatalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Produk domestik Regional Bruto merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh Daerah dalam periode waktu tertentu). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut sebagai berikut (Sukirno, 2006) :

1. Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993

dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan; rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; jasa-jasa

2. Cara Pengeluaran

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti ; pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari hutang, konsumen pemerintah, pembentukan modal tertentu domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto.

3. Cara Pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh faktor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber lain, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan

PDRB disajikan atas 3 dasar yaitu

a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar

Angka Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah yang timbul dari seluruh perekonomian wilayah tersebut.

b. Produk domestik regional neto atas dasar harga pasar

Perbedaan antara konsep neto dan konsep bruto adalah karena pada konsep bruto, penyusutan masih termasuk didalamnya sedangkan pada konsep neto, komponen penyusutan sudah dikeluarkan. Jadi prosuk domestik regional bruto atas harga pasar dikurang penyustan akan diperoleh produk domestik regional neto atas dasar harga pasar

Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang tersebut yang ikut serta dalam proses produksi, jika nilai susutnya barang-barang modal

dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

c. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut Pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor/impor, bea cukai, ipeda dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung ini oleh unit-unit produk dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli, sehingga pajak tidak langsung berakibat menaikkan harga barang.

Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang sama terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lainnya menurunkan, sehingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Jika produk domestik regional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka akan diperoleh produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor.

2.5.2 Pendapatan Asli daerah

Menurut Halim (2004), Pendapatan asli daerah (PAD) Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dan menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik negara, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain Pendapatan asli daerah yang sah. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan UU. No. 28 Tahun 2009, mendefinisikan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil Retribusi Daerah

Berdasarkan UU. No. 28 Tahun 2009, mendefinisikan retribusi daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi terdiri atas tiga objek, antara lain : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

UU No. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.5.3 Dana Alokasi Umum

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang No.33 tahun 2004).

Secara definisi DAU diartikan sebagai berikut (Sidik, 2004), Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kedua Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Dan yang ketiga *Equalization Grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah.

Menurut Halim (2009) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

2.5.4 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK

cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dalam website www.depkeu.djpk.go.id kebijakan DAK bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.6 Penelitian Terdahulu

Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data Laporan Realisasi APBD dan Data Statistik PDRB. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data Laporan Realisasi APBD. Hasil dari penelitian ini adalah PAD dan DAU Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Putro & Pamudji (2011) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU, terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data Realisasi APBD. Hasil penelitian tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

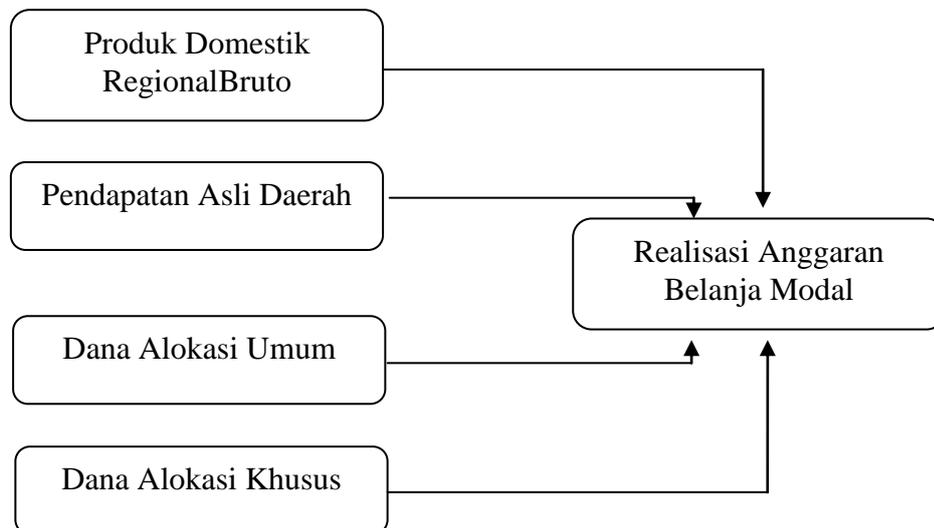
Situngkir (2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatra Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen realisasi APBD. Hasil penelitian tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Penelitian Kaeksi (2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Realisasi APBD dan data PDRB. Hasil penelitian tersebut adalah DAU dan Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Pengembangan Hipotesis

Pertumbuhan Ekonomi Daerah merupakan proses kenaikan output perkapita yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pembangunan sarana dan prasarana pemerintah (Kuncoro, 2004). Belanja modal merupakan belanja yang digunakan pemerintah untuk memenuhi sarana dan prasarana guna untuk menyejahterakan masyarakat. Nugroho (2010) menjelaskan Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi sangat mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja daerah dalam menggali potensi daerah yang ada. Hasil dari potensi daerah tersebut nantinya akan mempengaruhi pada tingkat pelayanan publik terhadap masyarakat yang akan dialokasikan dalam belanja modal. Maka upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat akan terwujud dengan menyediakan sarana dan prasana yang baik bagi masyarakat. dan masyarakat mendapat merasakan pembangunan daerah yang meningkat setiap periodenya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaeksi (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis pertama:

H₁ : PDRB berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004).

Setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerahnya. Hal itu juga di dukung dengan perbaikan sarana dan prasarana yang juga digunakan ingkatuntuk mengoptimalkan potensi daerah tersebut. Pendapatan Daerah nantinya akan kembali digunakan untuk menyediakan pelayanan publik dan memenuhi sarana dan prasana yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang

diterima. Sehingga apabila pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD sebesar-besarnya.

Hasil penelitian ini juga dibuktikan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian empiris terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal

Menurut Halim (2004), “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Dana alokasi umum dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang tidak bisa tercukupi dengan sumber penerimaan asli daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk memenuhi segala sarana dan prasarana daerah di semua bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan dan lain-lain. Pengalokasian belanja modal tentunya harus maksimal untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Pemberian dana transfer dari pusat belum bisa menciptakan kemandirian fiskal, hal itu membuat ketergantungan daerah akan dana transfer menjadi semakin tinggi. Hal itu juga berdampak pada kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik melalui merealisasikan anggaran belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka realisasi Anggaran Belanja Modal akan semakin tinggi.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis :

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan dana transfer yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pemerintah daerah.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa DAK memiliki kontribusi dalam realisasi anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja modal, maka dapat dirumuskan hipotesis perumusan:

H₄ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sampel merupakan sebagian dari elemen populasi yang dijadikan sebagai subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel dalam penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling yaitu yaitu pemilihan sampel dengan tujuan berdasarkan pertimbangan. Sehingga setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan criteria sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai data Laporan Realisasi APBD lengkap mulai tahun 2009-2012
2. Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Timur yang memiliki data Belanja Modal lengkap mulai tahun 2009 – 2012
3. Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Timur yang memiliki data lengkap mengenai PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mulai tahun 2009 – 2012

3.2 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber melainkan melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 2001). Data yang diambil berupa data realisasi APBD selama periode tahun 2009-2012. Data diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah (DJPK), Situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, jurnal, artikel maupun literatur yang berhubungan dengan data penelitian.

3.3 Variabel Operasional

Untuk memudahkan dalam pengolahan dan analisis data, digunakan beberapa variabel operasional. Definisi variabel operasional berkaitan dengan proses analisis data pada penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Variabel Dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiono, 2009). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Indikator Belanja Modal (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil logaritma natural data Realisasi Belanja Modal. Data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD.

- b. Variabel Independen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2009). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Produk domestik Regional Bruto merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh Daerah dalam periode waktu tertentu). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan (Sukirno, 2006). Indikator tingkat Produk Domestik Regional Bruto (X_1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil logaritma natural data PDRB Berdasarkan harga konstan. Data diperoleh dari situs resmi BPS Provinsi Jawa Timur

2. Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2002), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik negara, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Indikator Pendapatan Asli Daerah (X_2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil logaritma natural data Pendapatan Asli Daerah. Data diperoleh dari laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Timur.

3. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang No.33 tahun 2004). Indikator Dana Alokasi Umum (X_3) yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil logaritma natural data Dana Alokasi Umum. Data diperoleh dari laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Timur.

4. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Indikator Dana Alokasi Khusus (X_4) yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil logaritma natural Dana Alokasi Khusus. Data diperoleh dari laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Timur.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Tujuan penggunaannya adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai data penelitian dan hubungan yang ada antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), statistik dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal. Jika nilai independen tidak mengikuti distribusi normal, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2007). Metode yang digunakan untuk mengetahui normalitas residual dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik klmogrof smirnov, yang membandingkan data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

2) Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antarvariabel independen (Ghozali, 2007). Pengujian multikolinearitas dilakuakn dengan melihat (1) nilai toleransi dan lawannya (2) VIF (variance inflation faktor). Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $<0,10$ atau sama dengan VIF > 10 .

3) Uji heterokedasitas

Menurut Ghozali (2007), uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah homokedasitasnya atau tidak terjadi heterokedasitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi heterokedasitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedasitas dapat dilihat dari grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan

residualnya SPRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, amka telah terjadi heterokedasitas,. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heterokedasitas (Ghozali, 2007)

4) Uji Autokorelasi

Tujuan dari Pengujian ini adalah mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (tahun sebelumnya). Jika terjadi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin.Watson berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2007). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dalam regresi digunakan Durbin Watson dan statistic test dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 3.1

Pengambilan Keputusan Autokorelasi

H_0	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi Negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi Negatif	No Desicion	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif / negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Metode Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal. Model regresi penelitian ini adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Y : Alokasi Belanja Modal

α : Konstanta

β_{1-4} : Koefisien Regresi

X_1 : PDRB

X_2 : Pendapatan Asli Daerah

X_3 : Dana Alokasi Umum

X_4 : Dana Alokasi Khusus

E : Error

3.5.2 Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil mempunyai arti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007).

3.5.3 Uji F

Uji F digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (Ghozali, 2007)

3.5.4 Uji t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji statistik t merupakan perbandingan dari t hitung dengan t tabel, apabila nilai statistik t hitung lebih tinggi dari pada t tabel, maka suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang dilakukan yaitu sebesar 5%. Jika Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (Ghozali, 2007).

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh PDRB, PAD, DAU, dan DAK terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasa, maka diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh tidak signifikan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan Pembangunan Daerah yang semakin meningkat dan Produk Domestik Bruto sebagai indicator Pertumbuhan Ekonomi, tidak mempengaruhi pemerintah dalam merealisasikan anggaran Belanja Modal.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah sudah dialokasikan dalam Realisasi Anggaran Belanja Modal. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah sudah menggunakan Pendapatan Asli daerah untuk memenuhi belanja modal yang dibutuhkan daerah.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Modal sangat dipengaruhi oleh Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Umum. Ini juga menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur masih tergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Dana yang di alokasikan untuk kegiatan khusus daerah, dengan tujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana public, tidak mempengaruhi realisasi Anggaran Belanja Modal.

5.2 Keterbatasan

Berikut ini beberapa keterbatasan penulis yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti- peneliti selanjutnya :

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh 4 variabel independen terhadap Variabel dependen yaitu Realisasi Belanja Modal. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 44,8 % variasi variabel dependen yaitu Realisasi Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi 4 variabel independen yaitu PDRB, PAD, DAU, dan DAK.
2. Sampel penelitian hanya mencakup Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Periode penelitian hanya selama 4 tahun yaitu 2009 - 2012 , dimana fluktuasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlalu tajam.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, saran yang dapat dijadikan pertimbangan peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu

1. Menambah variabel independen atau factor-factor lain yang dapat mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Modal, agar koefisien determinasi lebih mendekati 100% untuk menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi Realisasi Anggaran belanja Modal, sebagai contoh SiLPa, Jumlah Penduduk, dan lain-lain
2. Penelitian diperluas tidak hanya satu provinsi, sehingga dapat membandingkan dari hasil dari masing-masing provinsi.
3. Penelitian selanjutnya hendaknya diperpanjang periode penelitian, minimal 5 tahun sesuai dengan periode pemerintahan. Sehingga dapat dilihat fluktuasi kenaikan dan penurunan pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita (Studi pada Kabupaten/Kota se- Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi X : Makasar
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Dearah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS: Cetakan ke-IV*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul, 2004. *Bungai Rampal Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Indriantoro, N dan Bambang S. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen :Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE
- Istiqomah, Yuyun. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal se-Provinsi Sumatera Utara 2007-2010*. Skripsi : Universitas Muria Kudus
- Kaeksi, Anandani Sih. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empirik Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2009 – 2011)*. ABMR Vol. 2 STIE Malangkuçeçwara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Ssektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat

Nordiawan Deddi, Putra Iswahyudi, Rahmawati Maulida. 2006. *Akuntansi Pemerintahan : Jilid Pertama*. Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomo 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah

Pernyataan No. 2 Standar Akuntansi Pemerintah tentang Laporan Realisasi Anggaran

Prakosa. 2005. *“Pajak dan Retribusi Daerah”*. Yogyakarta. UII Press

Putro, Nugroho Suratmo & Pamudji, Sugeng. 2011. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal*.

Sugiono. 2009. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : CV ALFABETA

Sadono, Sukirno. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar : Edisi Ketiga*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Situngkit, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Sumatera Utara

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

<http://www.djpk.depkeu.go.id>

<http://jatim.bps.go.id/>

LAMPIRAN I

LOGARITMA NATURAL DATA PENELITIAN

No	Kabupaten/Kota	2009					2010				
		BM	PDRB	PAD	DAU	DAK	BM	PDRB	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Bangkalan	25,7748	28,7984	24,2636	26,8945	24,9560	25,6054	28,8517	24,4362	26,9331	24,9733
2	Kab. Banyuwangi	26,4259	29,9693	25,1889	27,3655	25,1042	25,6451	30,0299	25,2303	27,3591	25,1250
3	Kab. Blitar	25,9679	29,2989	24,7883	27,1688	25,0386	25,8836	29,3583	24,8804	27,1843	24,8806
4	Kab. Bojonegoro	26,0949	29,4534	24,9751	27,1142	24,4824	25,4773	29,5575	25,1039	27,0928	24,7728
5	Kab. Bondowoso	25,4418	28,7530	24,4152	26,8446	24,5085	25,4525	28,8084	24,6285	26,8967	24,7863
6	Kab. Gresik	25,5371	30,3880	25,8490	26,9603	24,8564	25,1646	30,4546	25,8451	26,9645	24,0254
7	Kab. Jember	26,1472	30,0246	25,6287	27,5696	25,0357	25,7327	30,0844	25,7401	27,5850	25,1978
8	Kab. Lamongan	26,0525	29,3490	24,9923	27,0893	25,1488	25,3908	29,4153	25,2797	27,1313	24,8170
9	Kab. Madiun	25,6548	28,6649	24,1282	26,8622	24,6059	25,3135	28,7228	24,5307	26,8887	24,5296
10	Kab. Magetan	25,6581	28,7273	24,6116	26,9168	24,9715	24,8855	28,7837	24,6738	26,9453	24,5548
11	Kab. Malang	26,3680	30,2807	25,7571	27,5893	25,2664	26,3237	30,3443	25,5944	27,5976	25,2081
12	Kab. Nganjuk	26,0567	29,2416	25,0037	27,1048	24,9903	25,0474	29,3029	25,0991	27,1169	24,7916

13	Kab. Ngawi	25,3450	28,6761	23,9646	27,0434	24,9696	24,6630	28,7362	24,0371	27,0741	24,7812
14	Kab. Pacitan	25,2999	27,9639	24,0435	26,7850	24,8375	25,0012	28,0284	24,1073	26,8002	24,7834
15	Kab. Pamekasan	25,6627	28,3277	24,4176	26,8507	24,8255	25,3428	28,3838	24,6215	26,8881	24,7031
16	Kab. Pasuruan	25,9712	29,5031	25,1968	27,1304	25,2111	25,5801	29,5637	25,3315	27,1787	24,8416
17	Kab. Ponorogo	25,7403	28,7628	24,5954	27,0345	25,0828	25,3097	28,8200	24,6082	27,0581	24,8126
18	Kab. Situbondo	25,5345	28,8353	24,2471	26,7950	24,8307	25,1767	28,8928	24,5644	26,8272	24,4113
19	Kab. Trenggalek	25,4631	28,6650	24,4230	26,8673	24,9565	25,2174	28,7248	24,7040	26,8810	24,8293
20	Kab. Tulungagung	25,5938	29,6369	25,1339	27,1611	25,1511	25,5643	29,7013	25,2706	27,1987	24,6828
21	Kota Blitar	25,4373	27,5811	24,4087	26,1425	24,2228	25,2422	27,6455	24,5880	26,1348	23,3838
22	Kota Kediri	26,0079	30,7401	25,2102	26,7351	24,0647	25,7886	30,7983	25,2536	26,7678	20,6220
23	Kota Madiun	25,0319	28,3233	24,5047	26,3302	24,1516	25,5372	28,3907	24,4551	26,3268	23,5856
24	Kota Malang	26,1470	30,2784	25,2502	26,8797	23,7484	25,9970	30,3424	25,4550	26,9276	22,7351
25	Kota Mojokerto	25,5113	27,8270	24,0610	26,1957	24,0112	25,2008	27,8915	24,1763	26,2244	23,4341
26	Kota Pasuruan	25,4626	27,7178	24,2978	26,1647	24,3751	25,0078	27,7760	24,2526	26,1698	23,4832
27	Kota Probolinggo	25,6160	28,2989	24,4143	26,2822	24,2802	25,3819	28,3609	24,5457	26,3157	23,7728
28	Kota Batu	25,6868	27,9252	23,5790	26,1084	24,2209	25,3036	27,9943	23,5988	26,2356	23,6288

LOGARITMA NATURAL DATA PENELITIAN

No	Kabupaten/Kota	2011					2012				
		BM	PDRB	PAD	DAU	DAK	BM	PDRB	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Bangkalan	26,3922	28,9125	24,8983	27,0612	25,2050	26,3451	28,9750	25,1086	27,2751	24,9909
2	Kab. Banyuwangi	26,2481	30,0989	25,4539	27,4266	25,1289	26,5967	30,1692	25,6614	27,6608	24,9377
3	Kab. Blitar	25,8009	29,4205	25,0565	27,2710	25,2228	26,1368	29,4828	25,2853	27,4627	24,6564
4	Kab. Bojonegoro	25,4987	29,6455	25,8267	27,2234	24,9416	26,2350	29,7021	25,7937	27,3897	24,9479
5	Kab. Bondowoso	25,8583	28,8693	24,9252	27,0147	24,9270	26,0732	28,9319	25,0780	27,2258	24,9041
6	Kab. Gresik	25,5682	30,5259	26,3363	27,0531	24,5592	25,7949	30,5975	26,7827	27,2912	25,1361
7	Kab. Jember	26,0707	30,1540	25,9300	27,6880	25,3244	26,6442	30,2241	26,2677	27,8773	25,2810
8	Kab. Lamongan	25,9717	29,4836	25,3239	27,2451	25,2035	26,3256	29,5533	25,5853	27,4471	24,9836
9	Kab. Madiun	25,5167	28,7857	24,7837	26,9829	24,6959	25,9626	28,8494	24,9508	27,1939	24,6185
10	Kab. Magetan	25,7171	28,8437	24,8465	27,0264	24,7603	25,6054	28,9068	25,0854	27,2416	24,7169
11	Kab. Malang	26,3992	30,4153	25,8727	27,6788	25,4097	26,8638	30,4882	26,0078	27,8791	25,4960
12	Kab. Nganjuk	25,4591	29,3656	25,2696	27,2299	24,5585	25,9388	29,4306	25,5530	27,4414	24,7900
13	Kab. Ngawi	25,7714	28,7963	24,8429	27,2070	24,9683	25,5287	28,8609	24,8444	27,4039	24,8791

14	Kab. Pacitan	25,6606	28,0934	24,6019	26,8983	24,7133	25,7572	28,1589	24,7715	27,1031	24,6692
15	Kab. Pamekasan	25,8057	28,4447	24,9818	26,9640	24,8798	26,0189	28,5070	25,1586	27,1624	24,8357
16	Kab. Pasuruan	25,7100	29,6330	25,7685	27,2944	25,0464	26,1791	29,7034	25,9955	27,4995	24,9165
17	Kab. Ponorogo	25,5731	28,8821	24,9120	27,1760	25,0377	25,9879	28,9467	25,4125	27,3814	24,8566
18	Kab. Situbondo	25,5167	28,9548	24,8447	26,9689	24,8332	25,7718	29,0188	24,9287	27,1467	24,9237
19	Kab. Trenggalek	25,5615	28,7880	24,8677	27,0060	24,8467	25,6267	28,8530	24,9746	27,2069	24,7091
20	Kab. Tulungagung	25,6502	29,7679	25,5477	27,3076	25,1146	26,1149	29,8355	25,8119	27,5012	24,9526
21	Kota Blitar	25,8291	27,7098	24,6853	26,2451	23,8778	25,2337	27,7759	24,8765	26,4783	23,5871
22	Kota Kediri	25,3830	30,8746	25,5063	26,7124	22,2331	25,9695	30,9485	25,5316	26,9184	19,8655
23	Kota Madiun	25,2842	28,4610	24,8391	26,4193	23,9043	25,6459	28,5369	25,0004	26,7467	23,7326
24	Kota Malang	25,7994	30,4121	25,9480	27,0027	23,4692	26,3153	23,5786	26,1605	27,2244	23,8096
25	Kota Mojokerto	24,6413	27,9570	24,4649	26,3047	23,7384	25,3942	28,0265	24,7018	26,4569	23,4618
26	Kota Pasuruan	25,1031	27,8375	24,5347	26,2990	23,4475	24,9694	27,9014	24,4696	26,4898	23,6708
27	Kota Probolinggo	25,3965	28,4255	24,7743	26,4641	23,8401	25,1625	28,4928	24,9612	26,6303	24,2142
28	Kota Batu	25,3899	28,0729	24,1325	26,3345	23,5902	24,9047	28,1523	24,3815	26,5064	23,5318

REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Ket
		2009	2010	2011	2012	
1	Kab. Bangkalan	156.259.449.087,00	131.911.935.772,00	289.713.354.612,00	276.400.000.000,00	
2	Kab. Banyuwangi	299.667.852.129,67	137.257.934.500,96	250.847.215.238,00	355.482.000.000,00	
3	Kab. Blitar	189.543.568.987,37	174.225.246.096,50	160.389.019.278,64	224.421.000.000,00	
4	Kab. Bojonegoro	215.207.621.221,60	116.052.979.224,00	118.561.540.199,00	247.573.000.000,00	
5	Kab. Bondowoso	112.005.479.411,00	113.213.796.549,81	169.878.279.817,00	210.600.000.000,00	
6	Kab. Gresik	123.202.543.044,00	84.883.967.003,00	127.092.938.727,00	159.429.000.000,00	
7	Kab. Jember	226.759.413.838,00	149.822.296.804,15	210.061.688.084,75	372.744.000.000,00	
8	Kab. Lamongan	206.287.004.700,00	106.435.063.468,00	190.276.002.925,00	271.049.000.000,00	
9	Kab. Madiun	138.596.784.156,00	98.512.664.074,00	120.721.114.847,01	188.552.000.000,00	
10	Kab. Magetan	139.055.082.824,00	64.212.256.464,00	147.506.172.726,00	131.917.000.000,00	
11	Kab. Malang	282.790.499.270,00	270.553.895.728,60	291.757.474.147,00	464.305.000.000,00	
12	Kab. Nganjuk	207.157.097.345,00	75.499.653.605,80	113.963.922.938,00	184.104.000.000,00	
13	Kab. Ngawi	101.671.442.161,16	51.403.919.651,00	155.727.904.782,00	122.174.000.000,00	
14	Kab. Pacitan	97.189.650.565,65	72.094.433.778,27	139.396.015.800,24	153.539.000.000,00	
15	Kab. Pamekasan	139.685.851.894,00	101.443.788.544,00	161.158.657.395,69	199.461.000.000,00	
16	Kab. Pasuruan	190.172.286.609,00	128.619.417.002,00	146.451.940.246,53	234.131.000.000,00	

17	Kab. Ponorogo	150.960.894.157,60	98.140.663.137,00	127.715.395.078,00	193.382.000.000,00	
18	Kab. Situbondo	122.877.793.721,00	85.925.600.152,87	120.719.312.264,00	155.801.000.000,00	
19	Kab. Trenggalek	114.411.456.448,00	89.494.803.780,00	126.243.346.382,00	134.758.000.000,00	
20	Kab. Tulungagung	130.392.638.058,49	126.601.969.163,00	137.953.157.645,33	219.556.000.000,00	
21	Kota Blitar	111.495.557.389,96	91.736.072.130,74	164.987.191.353,36	90.964.000.000,00	
22	Kota Kediri	197.282.177.074,00	158.431.307.643,00	105.611.921.273,70	189.846.000.000,00	
23	Kota Madiun	74.336.559.801,02	123.209.747.855,00	95.674.953.766,00	137.366.000.000,00	
24	Kota Malang	226.717.544.173,00	195.134.340.828,96	160.159.269.793,00	268.292.000.000,00	
25	Kota Mojokerto	120.059.713.810,00	88.017.059.240,00	50.302.095.109,00	106.798.000.000,00	
26	Kota Pasuruan	114.358.995.117,00	72.568.325.887,00	79.827.843.341,00	69.832.000.000,00	
27	Kota Probolinggo	133.313.103.134,01	105.488.555.563,27	107.039.867.358,90	84.707.000.000,00	
28	Kota Batu	143.102.657.348,00	97.543.062.910,03	106.341.048.268,00	65.462.000.000,00	

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO HARGA KONSTAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2012**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Ket
		2009	2010	2011	2012	
1	Kab. Bangkalan	3.213.680.000.000,00	3.389.540.000.000,00	3.602.040.000.000,00	3.834.450.000.000,00	
2	Kab. Banyuwangi	10.362.870.000.000,00	11.011.070.000.000,00	11.797.370.000.000,00	12.657.000.000.000,00	
3	Kab. Blitar	5.300.680.000.000,00	5.625.140.000.000,00	5.986.080.000.000,00	6.371.390.000.000,00	
4	Kab. Bojonegoro	6.186.440.000.000,00	6.865.180.000.000,00	7.496.930.000.000,00	7.933.290.000.000,00	
5	Kab. Bondowoso	3.070.900.000.000,00	3.245.780.000.000,00	3.449.500.000.000,00	3.672.610.000.000,00	
6	Kab. Gresik	15.752.480.000.000,00	16.837.440.000.000,00	18.081.040.000.000,00	19.424.160.000.000,00	
7	Kab. Jember	10.952.570.000.000,00	11.627.270.000.000,00	12.465.660.000.000,00	13.371.420.000.000,00	
8	Kab. Lamongan	5.573.060.000.000,00	5.955.370.000.000,00	6.376.350.000.000,00	6.836.690.000.000,00	
9	Kab. Madiun	2.812.080.000.000,00	2.979.550.000.000,00	3.172.940.000.000,00	3.381.790.000.000,00	
10	Kab. Magetan	2.992.920.000.000,00	3.166.690.000.000,00	3.362.510.000.000,00	3.581.550.000.000,00	
11	Kab. Malang	14.150.030.000.000,00	15.078.990.000.000,00	16.188.050.000.000,00	17.411.760.000.000,00	
12	Kab. Nganjuk	5.005.510.000.000,00	5.322.080.000.000,00	5.666.390.000.000,00	6.047.180.000.000,00	
13	Kab. Ngawi	2.843.690.000.000,00	3.019.650.000.000,00	3.206.810.000.000,00	3.420.660.000.000,00	
14	Kab. Pacitan	1.395.000.000.000,00	1.487.870.000.000,00	1.587.820.000.000,00	1.695.280.000.000,00	
15	Kab. Pamekasan	2.007.040.000.000,00	2.122.890.000.000,00	2.256.090.000.000,00	2.401.240.000.000,00	
16	Kab. Pasuruan	6.501.850.000.000,00	6.907.850.000.000,00	7.404.060.000.000,00	7.943.830.000.000,00	

17	Kab. Ponorogo	3.101.140.000.000,00	3.283.720.000.000,00	3.494.230.000.000,00	3.727.280.000.000,00	
18	Kab. Situbondo	3.334.190.000.000,00	3.531.690.000.000,00	3.757.410.000.000,00	4.006.100.000.000,00	
19	Kab. Trenggalek	2.812.290.000.000,00	2.985.430.000.000,00	3.180.370.000.000,00	3.394.020.000.000,00	
20	Kab. Tulungagung	7.432.830.000.000,00	7.927.150.000.000,00	8.472.830.000.000,00	9.065.390.000.000,00	
21	Kota Blitar	951.280.000.000,00	1.014.590.000.000,00	1.081.930.000.000,00	1.155.930.000.000,00	
22	Kota Kediri	22.401.120.000.000,00	23.743.300.000.000,00	25.625.130.000.000,00	27.590.860.000.000,00	
23	Kota Madiun	1.998.280.000.000,00	2.137.600.000.000,00	2.293.330.000.000,00	2.474.020.000.000,00	
24	Kota Malang	14.117.660.000.000,00	15.049.800.000.000,00	16.136.930.000.000,00	17.380.760.000.000,00	
25	Kota Mojokerto	1.216.460.000.000,00	1.297.520.000.000,00	1.385.360.000.000,00	1.485.040.000.000,00	
26	Kota Pasuruan	1.090.670.000.000,00	1.156.040.000.000,00	1.229.400.000.000,00	1.310.470.000.000,00	
27	Kota Probolinggo	1.950.020.000.000,00	2.074.930.000.000,00	2.213.320.000.000,00	2.367.470.000.000,00	
28	Kota Batu	1.342.020.000.000,00	1.438.070.000.000,00	1.555.600.000.000,00	1.684.120.000.000,00	

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Ket
		2009	2010	2011	2012	
1	Kab. Bangkalan	34.477.143.994,68	40.975.170.911,35	65.039.401.772,82	80.269.572.727,00	
2	Kab. Banyuwangi	86.977.565.944,72	90.656.905.526,30	113.364.553.469,87	139.515.000.000,00	
3	Kab. Blitar	58.268.283.130,58	63.888.553.129,00	76.190.965.173,02	95.782.155.449,00	
4	Kab. Bojonegoro	70.233.938.303,98	79.891.483.832,32	164.585.991.460,32	159.248.000.000,00	
5	Kab. Bondowoso	40.121.861.293,10	49.663.941.019,39	66.816.392.275,09	77.846.177.657,00	
6	Kab. Gresik	168.302.821.579,56	167.644.725.522,47	273.975.992.140,13	428.126.000.000,00	
7	Kab. Jember	135.022.286.377,97	150.935.737.792,43	182.494.390.158,79	255.805.000.000,00	
8	Kab. Lamongan	71.452.396.308,29	95.244.807.228,09	99.545.629.500,31	129.285.000.000,00	
9	Kab. Madiun	30.112.862.499,21	45.034.305.944,66	57.998.223.512,34	68.546.790.751,00	
10	Kab. Magetan	48.831.608.108,61	51.964.929.106,62	61.760.661.908,04	78.423.247.877,00	
11	Kab. Malang	153.526.441.537,99	130.465.915.607,92	172.333.275.999,86	197.254.000.000,00	
12	Kab. Nganjuk	72.274.642.864,63	79.507.391.611,49	94.283.242.448,99	125.173.000.000,00	
13	Kab. Ngawi	25.567.881.123,83	27.489.942.064,49	61.539.122.182,19	61.632.823.113,00	
14	Kab. Pacitan	27.666.707.833,39	29.488.179.487,72	48.359.915.660,96	57.298.239.683,00	
15	Kab. Pamekasan	40.220.358.249,32	49.313.077.417,73	70.704.959.013,38	84.377.021.981,00	
16	Kab. Pasuruan	87.668.802.526,57	100.309.476.757,47	155.276.540.400,47	194.859.000.000,00	
17	Kab. Ponorogo	48.046.560.260,05	48.664.624.186,31	65.936.673.551,92	108.766.000.000,00	

18	Kab. Situbondo	33.913.027.881,34	46.579.946.273,78	61.650.613.747,44	67.050.480.515,00	
19	Kab. Trenggalek	40.435.991.178,08	53.553.783.139,97	63.084.029.481,88	70.198.000.000,00	
20	Kab. Tulungagung	82.324.974.129,07	94.380.356.787,90	124.517.804.186,07	162.162.000.000,00	
21	Kota Blitar	39.860.842.246,42	47.690.974.774,42	52.564.078.517,39	63.640.945.339,00	
22	Kota Kediri	88.849.647.034,61	92.787.297.150,64	119.467.321.122,09	122.523.000.000,00	
23	Kota Madiun	43.880.880.252,97	41.757.000.273,53	61.305.077.273,73	72.030.950.610,00	
24	Kota Malang	92.476.383.151,21	113.490.265.808,78	185.818.563.982,76	229.810.000.000,00	
25	Kota Mojokerto	28.154.863.948,45	31.596.313.387,11	42.165.056.510,12	53.439.861.756,00	
26	Kota Pasuruan	35.678.357.863,22	34.101.032.333,50	45.213.899.175,76	42.366.216.434,00	
27	Kota Probolinggo	40.085.223.843,97	45.715.475.874,03	57.455.035.686,11	69.261.488.711,00	
28	Kota Batu	177.386.741.568,44	17.735.602.953,95	30.241.864.301,14	38.794.059.670,00	

DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Ket
		2009	2010	2011	2012	
1	Kab. Bangkalan	478.768.360.000,00	497.594.900.000,00	565.621.820.000,00	700.513.000.000,00	
2	Kab. Banyuwangi	766.830.353.000,00	761.897.082.000,00	815.156.279.000,00	1.030.220.000.000,00	
3	Kab. Blitar	629.881.991.000,00	639.739.427.000,00	6.976.549.769.000,00	845.118.000.000,00	
4	Kab. Bojonegoro	596.430.263.000,00	583.764.532.000,00	665.218.290.000,00	785.585.000.000,00	
5	Kab. Bondowoso	455.450.603.000,00	47.982.794.000,00	539.918.142.000,00	666.857.000.000,00	
6	Kab. Gresik	511.324.320.000,00	513.482.870.000,00	561.081.899.000,00	711.868.000.000,00	
7	Kab. Jember	940.397.110.000,00	955.007.373.000,00	1.058.648.472.000,00	1.279.300.000.000,00	
8	Kab. Lamongan	581.718.829.000,00	606.700.000.000,00	679.813.150.000,00	832.016.000.000,00	
9	Kab. Madiun	463.553.758.000,00	476.031.395.000,00	523.027.021.000,00	645.865.000.000,00	
10	Kab. Magetan	489.555.386.000,00	503.708.903.000,00	546.307.211.000,00	677.454.000.000,00	
11	Kab. Malang	959.098.690.000,00	967.107.349.000,00	1.048.944.562.000,00	1.281.610.000.000,00	
12	Kab. Nganjuk	590.834.933.000,00	598.046.354.000,00	669.592.985.000,00	827.299.000.000,00	
13	Kab. Ngawi	555.625.375.000,00	572.965.157.000,00	654.413.778.000,00	796.834.000.000,00	
14	Kab. Pacitan	429.136.640.000,00	435.690.795.000,00	480.580.537.000,00	589.830.000.000,00	
15	Kab. Pamekasan	458.239.639.000,00	475.711.035.000,00	513.246.316.000,00	625.873.000.000,00	
16	Kab. Pasuruan	606.162.820.000,00	636.119.395.000,00	714.197.150.000,00	876.732.000.000,00	
17	Kab. Ponorogo	550.746.051.000,00	563.868.637.000,00	634.409.502.000,00	779.078.000.000,00	

18	Kab. Situbondo	433.443.480.000,00	447.609.618.000,00	515.752.127.000,00	616.094.000.000,00	
19	Kab. Trenggalek	465.947.589.000,00	472.359.819.000,00	535.245.063.000,00	654.343.000.000,00	
20	Kab. Tulungagung	625.040.351.000,00	648.991.116.000,00	723.704.763.000,00	878.221.000.000,00	
21	Kota Blitar	225.699.721.000,00	223.964.245.000,00	250.086.735.000,00	315.773.000.000,00	
22	Kota Kediri	408.246.662.000,00	421.789.650.000,00	399.062.891.000,00	490.372.000.000,00	
23	Kota Madiun	272.305.980.000,00	271.396.486.000,00	297.695.488.000,00	413.004.000.000,00	
24	Kota Malang	471.739.208.000,00	494.910.987.000,00	533.491.887.000,00	665.928.000.000,00	
25	Kota Mojokerto	238.044.910.000,00	244.969.563.000,00	265.452.147.000,00	309.103.000.000,00	
26	Kota Pasuruan	230.764.737.000,00	231.964.161.000,00	263.950.449.000,00	319.425.000.000,00	
27	Kota Probolinggo	259.533.136.000,00	268.393.765.000,00	311.327.135.000,00	367.601.000.000,00	
28	Kota Batu	218.135.356.000,00	247.723.360.200,00	273.492.290.000,00	324.769.000.000,00	

DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Ket
		2009	2010	2011	2012	
1	Kab. Bangkalan	68.906.000.000,00	70.109.300.000,00	88.386.100.000,00	71.355.490.000,00	
2	Kab. Banyuwangi	79.909.000.000,00	81.595.300.000,00	81.911.900.000,00	67.656.190.000,00	
3	Kab. Blitar	74.839.000.000,00	63.902.500.000,00	89.971.900.000,00	51.064.455.000,00	
4	Kab. Bojonegoro	42.913.000.000,00	57.373.200.000,00	67.916.900.000,00	68.347.170.000,00	
5	Kab. Bondowoso	44.047.000.000,00	58.151.300.000,00	66.936.000.000,00	65.418.780.000,00	
6	Kab. Gresik	62.374.000.000,00	27.171.200.000,00	46.338.700.000,00	82.505.060.000,00	
7	Kab. Jember	74.621.000.000,00	87.752.900.000,00	99.597.200.000,00	95.364.740.000,00	
8	Kab. Lamongan	83.560.000.000,00	59.965.300.000,00	88.252.200.000,00	70.832.240.000,00	
9	Kab. Madiun	48.554.000.000,00	44.983.000.000,00	53.121.900.000,00	49.168.360.000,00	
10	Kab. Magetan	69.980.000.000,00	46.131.400.000,00	56.660.800.000,00	54.252.590.000,00	
11	Kab. Malang	93.983.000.000,00	88.658.700.000,00	108.468.200.000,00	118.237.000.000,00	
12	Kab. Nganjuk	71.311.000.000,00	58.462.400.000,00	46.304.650.000,00	58.366.860.000,00	
13	Kab. Ngawi	69.478.000.000,00	57.853.000.000,00	69.759.800.000,00	63.804.470.000,00	
14	Kab. Pacitan	61.207.000.000,00	57.983.600.000,00	54.055.900.000,00	51.724.730.000,00	
15	Kab. Pamekasan	60.478.000.000,00	53.507.900.000,00	63.850.100.000,00	61.093.880.000,00	
16	Kab. Pasuruan	88.929.172.000,00	61.458.700.000,00	75.424.200.000,00	66.236.310.000,00	
17	Kab. Ponorogo	78.219.000.000,00	59.996.000.000,00	74.774.900.000,00	62.386.740.000,00	

18	Kab. Situbondo	60.792.000.000,00	39.967.200.000,00	60.942.300.000,00	66.718.400.000,00	
19	Kab. Trenggalek	68.943.000.000,00	60.708.000.000,00	61.768.100.000,00	53.829.880.000,00	
20	Kab. Tulungagung	83.750.000.000,00	52.432.900.000,00	80.751.100.000,00	68.674.420.000,00	
21	Kota Blitar	33.100.000.000,00	14.303.500.000,00	23.441.800.000,00	17.527.970.000,00	
22	Kota Kediri	28.260.000.000,00	903.700.000,00	4.525.800.000,00	424.100.000,00	
23	Kota Madiun	30.825.000.000,00	17.503.800.000,00	24.070.500.000,00	20.273.450.000,00	
24	Kota Malang	20.597.000.000,00	7.476.800.000,00	15.578.900.000,00	21.897.310.000,00	
25	Kota Mojokerto	26.788.000.000,00	15.042.400.000,00	20.391.200.000,00	15.463.900.000,00	
26	Kota Pasuruan	38.546.000.000,00	15.799.500.000,00	15.244.300.000,00	19.058.200.000,00	
27	Kota Probolinggo	35.056.000.000,00	21.104.800.000,00	22.574.500.000,00	32.816.170.000,00	
28	Kota Batu	33.037.000.000,00	18.275.000.000,00	17.583.600.000,00	16.585.720.000,00	

LAMPIRAN II

Hasil Output SPSS

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Ln_BM</i>	112	24.64	26.86	25.6751	.42562
<i>Ln_PDRB</i>	112	23.58	30.95	29.0358	1.00254
<i>Ln_PAD</i>	112	23.58	26.78	24.9900	.60672
<i>Ln_DAU</i>	112	26.11	27.88	26.9771	.41689
<i>Ln_DAK</i>	112	19.87	25.50	24.4965	.84088
<i>Valid N (listwise)</i>	112				

UJi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Standardized Residual</i>
<i>N</i>		112
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.98181667
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.065
	<i>Positive</i>	.038
	<i>Negative</i>	-.065
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.689
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.730
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		

Uji Multikolinearitas

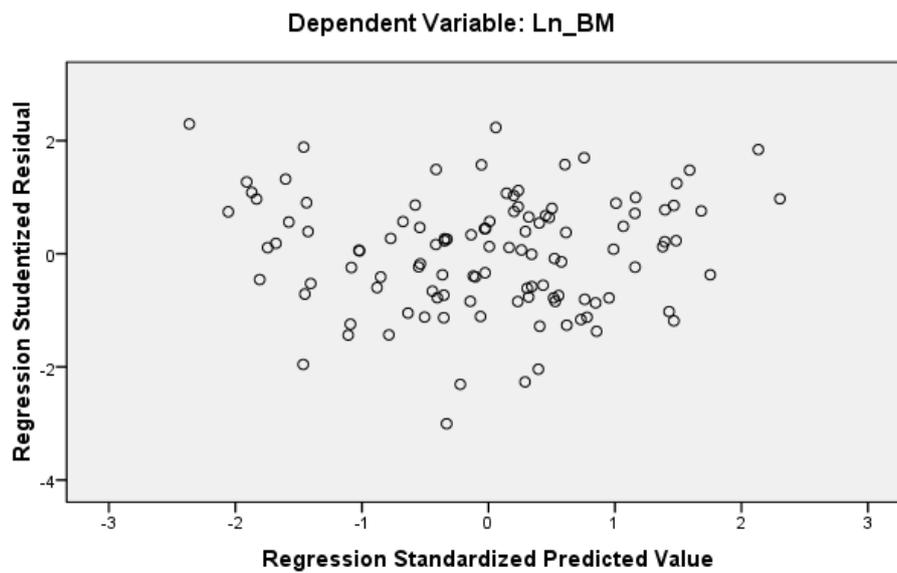
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	7.562	2.012	
	Ln_PDRB	.017	.040	.040
	Ln_PAD	.156	.079	.223
	Ln_DAU	.568	.142	.557
	Ln_DAK	.026	.049	.052

a. Dependent Variable: Ln_BM

Uji Heterokedasitas

Scatterplot



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
<i>1</i>	.684 ^a	.468	.448	.31612	1.248

b. Dependent Variable: Ln_BM

Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
<i>1</i>	<i>(Constant)</i>	7.562	2.012	
	<i>Ln_PDRB</i>	.017	.040	.040
	<i>Ln_PAD</i>	.156	.079	.223
	<i>Ln_DAU</i>	.568	.142	.557
	<i>Ln_DAK</i>	.026	.049	.052

a. Dependent Variable: Ln_BM

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
<i>1</i>	.684 ^a	.468	.448	.31612

b. Dependent Variable: Ln_BM

Uji F

ANOVA^b

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>1</i>	<i>Regression</i>	9.415	4	2.354	23.554	.000 ^a
	<i>Residual</i>	10.693	107	.100		
	<i>Total</i>	20.108	111			

a. Predictors: (Constant), Ln_DAK, Ln_PDRB, Ln_PAD, Ln_DAU

b. Dependent Variable: Ln_BM

Uji t

Coefficients^a

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>1</i>	<i>(Constant)</i>	7.562	2.012		3.758	.000
	<i>Ln_PDRB</i>	.017	.040	.040	.423	.673
	<i>Ln_PAD</i>	.156	.079	.223	1.984	.050
	<i>Ln_DAU</i>	.568	.142	.557	4.009	.000
	<i>Ln_DAK</i>	.026	.049	.052	.535	.594

a. Dependent Variable: Ln_BM